

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi dikemukakan oleh Moeheriono (2012). Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Padang khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam

rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Dari uraian tersebut diatas bahwa Indikator Kinerja Utama wajib dilaksanakan disetiap instansi pemerintahan, dan perlu meninjau bagaimana pelaksanaan pengukuran IKU pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Tinjauan Prosedur Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul tugas akhir ini maka masalah yang penulis rumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama untuk mencapai manajemen kinerja yang berhasil dan baik?

2. Bagaimana hasil dari pencapaian pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2017?

1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan Magang

1.3.1 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan dalam mengelola pengukuran Indikator Kinerja Utama untuk mencapai manajemen kinerja yang berhasil dan baik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hasil pencapaian pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang pada tahun 2017.

1.3.2 Manfaat Kegiatan Magang

Hasil dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pengaplikasian pengetahuan yang didapat diperkuliahan dengan yang terjadi di dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Hasil magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

1.4 Tempat dan Waktu Magang

Tempat magang ini sangat berperan dalam membantu mahasiswa untuk mengetahui aplikasi ilmu yang telah dimiliki di kampus dengan bagaimana

aplikasinya dilapangan. Untuk itu tempat magang yang dipilih adalah Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sesuai dengan jurusan yang dimiliki yaitu jurusan Kesekretariatan sebagai tempat melaksanakan kegiatan magang. Hal yang mendorong penulis untuk memilih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang adalah :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebuah instansi yang dapat meningkatkan Budaya dan Pariwisata Kota Padang.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai sebuah unit lembaga pemerintahan pusat yang dapat memanajemen dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan budaya dan tempat wisata di Kota Padang.

Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 2 bulan (40 hari kerja) dimulai pada tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan 02 Maret 2018.

1.5 Sistematika Laporan Magang

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang serta sistematika laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori meliputi hal-hal yang berhubungan dengan Prosedur Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan gambaran umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang meliputi sejarah singkat, ruang lingkup kegiatannya dan struktur organisasi kantor.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang menggambarkan tentang hasil yang diperoleh selama magang berupa tinjauan prosedur pelaksanaan dalam mengelola pengukuran Indikator Kinerja Utama untuk mencapai manajemen kinerja yang baik dan mengetahui hasil pencapaian pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang pada tahun 2017.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pelaksanaan magang serta saran-saran yang berhubungan dengan isi laporan





